

CATATAN KRITIS TEORI RUANG PUBLIK HABERMAS

Oleh :

John Foeh, M.Pd, Yumes Manu, M.Pd dan Orias Lazarus Selan, M.Pd

ABSTRAKSI

Tujuan utama dari makalah ini adalah untuk mengkaji penjelasan Habermas tentang transformasi ruang publik dalam masyarakat modern. Lebih khusus lagi, penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa, meskipun pendekatan Habermas berhasil menawarkan wawasan yang berguna tentang transformasi struktural ruang publik pada periode modern awal, pendekatan tersebut tidak menyediakan kerangka teoritis yang memadai untuk memahami transformasi struktural ruang publik dalam masyarakat modern akhir. Sejauh diferensiasi bertahap kehidupan sosial terwujud dalam proliferasi berbagai ruang publik, teori kritis normativitas publik perlu menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh kompleksitas material dan ideologis modernitas akhir untuk menjelaskan sifat polisentris masyarakat maju. Dengan tujuan untuk menunjukkan hal ini, makalah ini dibagi menjadi tiga bagian. Bagian pertama menjelaskan makna sosiologis dari dikotomi publik/swasta. Bagian kedua mengkaji fitur-fitur utama teori Habermas tentang ruang publik dengan merefleksikan (i) konsep ruang publik, (ii) kekhususan normatif ruang publik borjuis, dan (iii) transformasi struktural ruang publik dalam masyarakat modern. Bagian ketiga mengeksplorasi kekurangan paling substansial dari teori Habermas tentang ruang publik, khususnya ketidakmampuannya untuk menjelaskan kemunculan historis dan fungsi politik ruang publik yang terdiferensiasi dalam masyarakat maju.

Kata Kunci : Ruang Publik Habermans

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan utama dari makalah ini adalah untuk menguji penjelasan Habermas tentang transformasi ruang publik dalam masyarakat modern (lihat, khususnya, Habermas (1962, 1989; 1992; dan 1995)). Dalam terang analisis teori komunikasi Habermas tentang perkembangan historis, transformasi ruang publik pada abad kedelapan belas dan kesembilan belas tidak dapat dipisahkan dari munculnya era modern. Makalah ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa, meskipun pendekatan Habermas berhasil menawarkan wawasan yang berguna ke dalam transformasi struktural ruang publik pada periode modern awal, ia tidak memberikan kerangka teoritis yang memadai untuk memahami transformasi struktural ruang publik dalam masyarakat modern akhir. Diferensiasi bertahap kehidupan sosial modern akhir memanifestasikan dirinya dalam proliferasi berbagai ruang publik, dan karenanya teori kritis normativitas publik perlu menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh kompleksitas material dan ideologis modernitas akhir untuk menjelaskan sifat polisentris masyarakat maju.

Makalah ini dibagi menjadi tiga bagian. Bagian pertama menjelaskan secara singkat makna sosiologis dari dikotomi publik/privat. Mengingat bahwa perbedaan antara publik dan privat merupakan hal yang sangat penting dalam pemikiran sosial dan politik, penting untuk menyoroti signifikansi normatifnya. Bagian kedua meneliti fitur-fitur utama teori Habermas tentang ruang publik dengan merefleksikan (i) konsep ruang publik, (ii) kekhususan normatif ruang publik borjuis, dan (iii) transformasi struktural ruang publik dalam masyarakat modern. Bagian ketiga mengeksplorasi kekurangan paling substansial dari teori Habermas tentang ruang publik, terutama ketidakmampuannya untuk menjelaskan kemunculan historis dan fungsi politik ruang publik yang terdiferensiasi dalam masyarakat maju.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang seperti tertulis di atas maka perumusan masalah dari penelitian ini adalah apakah keunggulan dan kekurangan teori Habermans bagi pelayanan publik

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tertulis di atas tergambar tujuan penulisan ini adalah memberikan catatan kritis terhadap pelayanan publik berdasarkan teori Habermans

D. Metode Penelitian

Untuk mencapai tujuan dimaksud maka metode penulisan ini adalah kajian kepustakaan dengan jenis penelitian kualitatif

BAB II PEMBAHASAN

A. DIKOTOMI PUBLIK/PRIVASI

Untuk menegaskan kembali, tujuan utama dari makalah ini adalah untuk mengkaji penjelasan Habermas tentang transformasi ruang publik dalam masyarakat modern. Sebelum menganalisis pendekatan Habermas terhadap ruang publik secara lebih rinci di bagian kedua dan ketiga dari esai ini, pendahuluan ini akan membahas perbedaan antara ruang publik dan ruang privat, yang secara umum disebut sebagai "dikotomi publik/privat" (lihat, misalnya, Butt & Langdrige 2003, Condren 2009, Cutler 1997, Geuss 2001, Ossewaarde 2007, Rabotnikof 1998, Steinberger 1999, dan Weintraub & Kumar 1997).

1. Historisitas Dikotomi Publik/Pribadi

Historisitas dikotomi publik/pribadi terwujud dalam berbagai makna yang melekat pada gagasan tentang privat dan publik dalam konteks masyarakat yang berbeda. "Oleh karena itu, kategori Pencerahan berbeda dari leluhur Yunani klasiknya, sama seperti berbeda dari keturunan kontemporenya yang telah berubah" (Calhoun 1992b: 6). Dalam pemikiran Yunani kuno, perbedaan antara privat dan publik digunakan untuk menunjukkan cara masyarakat terbagi dengan jelas ke dalam dua ranah yang berbeda. Menurut pandangan ini, ranah polis dipisahkan secara ketat dari ranah oikos: sedangkan yang pertama menggambarkan ranah publik yang didasarkan pada interaksi terbuka antara warga negara yang bebas di ranah politik, yang terakhir menunjuk ranah privat yang didasarkan pada interaksi tersembunyi antara individu-individu yang bebas di ranah domestik (Habermas 1962, 1989: 3).

Meskipun, sekilas, kedua ranah ini mungkin tampak relatif otonom, pada kenyataannya keduanya saling bergantung: struktur kekuasaan ranah privat saling terkait erat dengan struktur kekuasaan ranah publik. "Status dalam polis...didasarkan pada status sebagai penguasa oikos yang tidak terbatas." Oleh karena itu, sebagaimana kebebasan warga negara yang otonom di ranah publik bertumpu pada otonomi privat mereka sebagai penguasa lingkungan domestik mereka, otonomi penguasa di ranah domestik menyegarkan kembali kebebasan mereka di ranah publik. Paradoksnya,

otonomi relatif antara ranah privat dan ranah publik bergantung pada determinasi timbal balik mereka. Mengingat saling ketergantungan struktural kedua ranah tersebut, polaritas publik/privat dapat dipahami sebagai timbal balik publik/privat. Analisis sosio-historis dari dikotomi publik/privat sangat penting karena memungkinkan kita untuk mengeksplorasi kontingensi material dan ideologis dari timbal balik publik/privat.

Pertama, kontingensi material dari dikotomi publik/swasta menjadi jelas ketika menganalisis manifestasi masyarakat yang berbeda dari variabilitas historisnya. Masyarakat yang berbeda menghasilkan bentuk kehidupan publik dan privat yang berbeda. Hubungan empiris antara publik dan privat bersifat fleksibel dan karenanya bervariasi dari waktu ke waktu dan antarmasyarakat. Kekhususan spasiotemporal dari setiap realitas sosial tidak memungkinkan kita untuk mereduksi dikotomi publik/privat menjadi pola universalitas tipologis. Pola diferensiasi struktural antara publik dan privat bervariasi antarmasyarakat.

Kedua, kontingensi ideologis dikotomi publik/privat mengemuka ketika meneliti berbagai representasi konseptual tentang variabilitas historisnya. Masyarakat yang berbeda menghasilkan wacana yang berbeda tentang hakikat kehidupan publik dan privat. Hubungan simbolis antara publik dan privat selalu dapat direkonstruksi dan karenanya bervariasi dari waktu ke waktu dan antarmasyarakat. Kekhususan spasiotemporal dari setiap ideologi sosial tidak memungkinkan kita untuk mereduksi dikotomi publik/privat menjadi pola universalitas tipologis. Dikotomi publik/privat dibangun secara diskursif dan dinegosiasikan secara simbolis dalam berbagai cara. Konsepsi dunia yang berbeda menciptakan makna dunia yang berbeda. Pola diferensiasi simbolis antara publik dan privat bervariasi antarmasyarakat.

Singkatnya, kelenturan dikotomi publik/swasta berasal dari kekhususan material dan ideologis masing-masing masyarakat. Salah satu pertanyaan yang muncul dari pemahaman sosio-historis tentang dikotomi publik/swasta dapat diutarakan sebagai berikut: Apa saja faktor utama yang menyebabkan transformasi bertahap hubungan antara publik dan privat di era modern? Jawaban Habermas untuk pertanyaan ini adalah bahwa "perkembangan kapitalisme dagang pada abad keenam belas, bersama

dengan perubahan bentuk kelembagaan kekuasaan politik, menciptakan kondisi bagi munculnya jenis baru ruang publik di Eropa modern awal" (Thompson 1995: 69) Dengan kata lain, transformasi mendalam konstitusi ekonomi dan simbolik masyarakat di era modern memicu terciptanya ruang publik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, sebelum mengkaji elemen-elemen kunci analisis Habermas tentang transformasi ini secara lebih rinci, penting untuk merenungkan berbagai makna dikotomi publik/swasta.

2. Ontologi Dikotomi Publik/Pribadi

Untuk memahami ontologi dikotomi publik/pribadi, kita perlu meneliti apa sebenarnya yang diwakili oleh pemisahan konseptual antara publik dan privat. Apa signifikansi normatif dari perbedaan antara publik dan privat? Mengingat variabilitas sosio-historis dari perbedaan ini, kita perlu mengakui bahwa makna dari "dikotomi besar" (Somers 2001: 24) antara publik dan privat bersifat berlapis-lapis dan kompleks, bukan satu dimensi dan lugas. Tiga makna berbeda yang umumnya dikaitkan dengan perbedaan publik/privat dapat diidentifikasi: masyarakat versus individu ("kolektif" versus "pribadi"), visibilitas versus penyembunyian ("transparan" versus "buram"), dan keterbukaan versus penutupan ("dapat diakses" versus "tertutup"). Ketiga makna ini merupakan "kriteria heterogen" (Rabotnikof 1998:3; Rabotnikof 1997:8) yang telah dikonseptualisasikan dengan cara yang berbeda dan digunakan dalam berbagai tingkatan dalam pemikiran sosial dan politik. Oleh karena itu, penting untuk diingat bahwa berbagai makna dikotomi publik/swasta harus dipahami sebagai perbedaan ideal-tipikal.

Makna pertama dikotomi publik/swasta mengacu pada perbedaan analitis utama dalam pemikiran sosial dan politik modern: perbedaan antara masyarakat dan individu. Perbedaan ini sering dipahami dalam hal diferensiasi biner seperti "sosial" versus "individu", "kolektif" versus "personal", dan "relasional" versus "monadik". Menurut definisi, ilmu sosial secara umum dan sosiologi secara khusus cenderung mengutamakan yang pertama daripada yang terakhir, karena minat paradigmatik dalam kekuatan penjelasan analisis sistematis "sosial" menggambarkan landasan ontologis disiplin ilmu sosial-ilmiah. Ilmu sosial akan diubah menjadi "ilmu individu", dan sosiologi akan diubah menjadi "individuologi", jika mereka berusaha membuktikan

keunggulan individu atas sosial. Terlepas dari kenyataan bahwa perbedaan filosofis antara individualisme metodologis dan holisme sosial menunjukkan bahwa ada ruang yang cukup besar untuk keterbukaan penjelasan, dan terlepas dari pertanyaan tentang bagaimana dikotomi publik/pribadi harus ditafsirkan, tidak ada keraguan bahwa ilmu sosial cenderung mempelajari individu dalam konteks sosial, daripada sosial dalam konteks individu. Dengan demikian, mengingatkan perhatian mereka terhadap konstitusi relasional. Dari segi realitas, ilmu sosial mempunyai ketertarikan khusus untuk mempelajari cara-cara di mana bentuk-bentuk kehidupan manusia dibagi secara sosial ke dalam ranah publik dan privat.

Makna kedua dari dikotomi publik/pribadi berkaitan dengan perbedaan analitis utama lainnya dalam pemikiran sosial dan politik modern: perbedaan antara visibilitas dan penyembunyian. Sifat kontroversial perbedaan ini muncul dari fakta bahwa masih jauh dari jelas aspek kehidupan sosial mana yang terlihat dan mana yang tersembunyi. Yang lebih kontroversial lagi adalah pertanyaan tentang aspek kehidupan sosial mana yang seharusnya terlihat dan mana yang seharusnya disembunyikan. Liberalisme—yang dapat secara sah digambarkan sebagai ideologi yang menang pada akhir abad kedua puluh dan awal abad kedua puluh satu—selalu sangat curiga terhadap negara-negara intervensionis dan, oleh karena itu, kritis terhadap upaya otoriter untuk mengendalikan ranah pribadi rakyat berdasarkan kekuatan publik negara. Ironisnya, dalam konteks modern, gagasan publik—yang dilambangkan dalam konsep-konsep politik seperti “kekuatan publik”, “kepentingan publik”, dan “opini publik”—telah digunakan untuk melemahkan kekuatan sewenang-wenang negara-negara yang berpotensi otoriter.

“Titik balik dalam kehidupan politik modern adalah pertempuran melawan negara yang tertutup atas nama “opini publik” dan “publisitas” (Peters 1993: 548).

Oleh karena itu, akan menjadi naif secara analitis dan tidak berdasar secara historis untuk berasumsi bahwa ranah negara dapat diidentifikasi secara eksklusif dengan ranah yang kasat mata. Yang pasti, negara dapat dianggap sebagai lembaga publik yang hakiki karena mewakili, atau mengklaim mewakili, sekelompok besar individu yang tinggal di wilayah yang di atasnya negara menikmati kedaulatan politik.

Dalam pengertian ini, negara dapat dianggap sebagai lembaga yang sah dan yang melegitimasi yang keberadaannya bergantung pada kedaulatan publik.

Namun, pelaksanaan kedaulatan “publik” ini dapat menjadi “privat” jika struktur kekuasaan internal negara secara sistematis disembunyikan oleh negara itu sendiri. Hal ini berlaku, pertama dan terutama, untuk negara otoriter, diktator, dan totaliter, tetapi juga, setidaknya sampai batas tertentu, untuk negara liberal dan demokratis. Apa pun kecenderungan ideologis aparatur negara tertentu, fungsi jangka panjang negara yang efisien dan berdaya guna bergantung pada koeksistensi struktur kekuasaan yang terlihat dan tersembunyi yang diproduksi dan direproduksi oleh elit politik masyarakat tertentu.

Makna ketiga dari dikotomi publik/privat menyangkut perbedaan analitis lebih lanjut dalam pemikiran sosial dan politik modern: perbedaan antara keterbukaan dan tertutupan. Namun, perlu diingat bahwa tidak semua ranah publik sepenuhnya “terbuka” dan tidak semua ranah privat sepenuhnya “tertutup”. Dengan kata lain, sebagaimana istilah “publik” dan “terbuka” tidak selalu dapat dipertukarkan, istilah “privat” dan “tertutup” tidak selalu saling mencakup. Meskipun negara tidak diragukan lagi dapat dianggap sebagai komponen integral dari ranah publik, karena alasan itu, negara tidak selalu terbuka dan dapat diakses. Dan meskipun keluarga dapat dianggap sebagai komponen integral dari ranah privat, akan keliru jika berasumsi bahwa keluarga merupakan ranah kehidupan sosial yang sepenuhnya tertutup dan tersegel. Tidak diragukan lagi bahwa semua negara—terlepas dari apakah negara itu republik atau monarki, liberal atau sosialis, laissez-faire atau intervensionis, libertarian atau totaliter—memerlukan derajat minimal keterhubungan dan penutupan diri secara sistemik. Demikian pula, semua keluarga—terlepas dari apakah mereka bagian dari masyarakat pramodern atau modern, pembagian kerja primitif atau kompleks, bentuk kehidupan berbasis kendali atau berbasis kebebasan, budaya kolektivistis atau individualis—memerlukan derajat minimal keterikatan dan keterbukaan masyarakat.

Singkatnya, tiga pasang konsep yang umumnya dikaitkan dengan perbedaan antara privat dan publik sama sekali tidak ambigu dan lugas. Sebagai kerangka tripartit untuk studi dikotomi publik/privat, pertentangan yang disebutkan di atas dapat

dianggap sebagai titik acuan utama dalam pemikiran sosial dan politik. Namun, mengingat sifat ideal-tipikal pembedaan antara privat dan publik, kegunaan analitis dan kekuatan penjelasan dari "dikotomi besar" harus diperiksa secara kritis. Jauh dari mewakili dikotomi dengan validitas yang tak terbantahkan, pembedaan antara publik dan privat harus dipahami sebagai alat konseptual yang berguna tetapi tetap kontroversial dalam analisis sosial dan politik.

B. TEORI HABERMAS TENTANG RUANG PUBLIK

Bagian ini bertujuan untuk mengkaji teori Habermas tentang ruang publik. Untuk melakukannya, analisis akan berusaha untuk menjawab tiga pertanyaan berikut: (i) Bagaimana konsep ruang publik dapat didefinisikan? (ii) Apa yang menjadi kekhususan normatif ruang publik borjuis? (iii) Apa saja ciri-ciri utama yang mendasari transformasi struktural ruang publik di era modern?

1. Konsep Ruang Publik

Sebagaimana dinyatakan di atas, konsep publik memiliki sejumlah makna yang berbeda. Meskipun definisi konsep ini ambigu, adalah mungkin dan berguna untuk mengembangkan kerangka analitis yang memungkinkan kita untuk memberikan keadilan terhadap kompleksitas ruang publik dalam masyarakat modern. Meskipun kita mengakui kompleksitas ini, penting untuk diingat bahwa setiap upaya untuk memberikan penjelasan sistematis tentang hakikat ruang publik tidak dapat dihindari akan menimbulkan kontroversi.

Menurut Habermas, "ranjang publik borjuis dapat dipahami terutama sebagai ranah orang-orang pribadi yang berkumpul sebagai publik" (Habermas 1962, 1989: 27). Oleh karena itu, ranah publik terdiri dari individu-individu pribadi yang saling keterhubungan sosialnya melampaui batas-batas kehidupan pribadi mereka. Jika ranah publik "didefinisikan sebagai publik dari individu-individu pribadi yang bergabung dalam perdebatan isu-isu yang berkaitan *dengan otoritas negara*" (Calhoun 1992b: 7; cetak miring pada aslinya), ranah publik dan ranah privat dapat dianggap sebagai ranah sosial yang saling inklusif, daripada saling eksklusif. Memang, publik dan privat tampaknya mewakili dua kondisi sosial yang diperlukan: sejauh setiap orang pribadi

diwakili oleh performativitas latar depan dari persona publik, setiap persona publik tertanam dalam subjektivitas latar belakang orang pribadi.

Karena pelaku manusia tidak dapat melepaskan diri dari berbagai proses sosialisasi yang dipaksakan kepada mereka oleh lingkungan mereka, bentuk privasi yang paling murni tidak dapat menghilangkan ketergantungan individu pada masyarakat. Individu dapat menegaskan privasi mereka hanya dalam kaitannya dengan, dan bukan dalam keterasingan dari, keberadaan individu lain. Dalam pengertian ini, ruang publik tidak lain adalah ekspresi sosial dari otonomi yang dibentuk secara timbal balik oleh individu: individu bersifat otonom bukan dalam keterasingan dari tetapi dalam kaitannya dengan satu sama lain, yaitu, dalam kaitannya dengan masyarakat yang terdiri dari makhluk-makhluk otonom.

Dari perspektif sosiologi, “pentingnya ruang publik terletak pada potensinya sebagai cara integrasi masyarakat” (Calhoun 1992b: 6). Koordinasi kehidupan sosial tidak dapat dilakukan oleh individu yang sepenuhnya mandiri dan mengacu pada diri sendiri yang mendapati diri mereka terbenam dalam ranah privat yang tertutup rapat dan berkelanjutan secara autopoietik. Menurut definisi, koordinasi sosial dilakukan oleh subjek yang saling berhubungan dan saling bergantung yang berada dalam ranah publik yang dinegosiasikan secara simbolis dan dibentuk secara material. Organisasi deliberatif yang terjadi di ruang publik dapat dianggap sebagai ekspresi dari sosiabilitas intrinsik kondisi manusia. Faktanya, tidak ada integrasi masyarakat tanpa keberadaan ruang publik. Sama seperti keberadaan setiap individu tidak dapat dipisahkan dari keberadaan masyarakat, keberadaan ruang privat tidak dapat dibayangkan tanpa keberadaan ruang publik.

Perlu disebutkan bahwa, dalam perdebatan Anglophone tentang Habermas, konsep “ruang publik” didasarkan pada terjemahan yang agak tidak tepat dari istilah Jerman *Öffentlichkeit*. Sementara istilah *Öffentlichkeit* secara harfiah berarti “kepublikasian” atau “publisitas”, gagasan *öffentlicher Raum*-lah yang menunjukkan gagasan “ruang publik” atau “ranah publik”. Demikian pula, perlu dicatat bahwa, dalam literatur berbahasa Inggris tentang Habermas, konsep “transformasi struktural” berasal dari terjemahan yang agak tidak tepat dari istilah Jerman *Strukturwandel* (Habermas

1962). Sementara istilah Strukturwandel secara harfiah merujuk pada “transformasi struktur”, gagasan struktureller Wandel-lah yang menunjukkan gagasan “perubahan struktural”. Jadi, penekanan dalam bahasa Jerman terletak pada gagasan transformasi struktur di ruang publik, bukan pada gagasan transformasi struktural ruang publik, seperti yang tersirat dalam terjemahan bahasa Inggris. Penting untuk mempertimbangkan ambiguitas terminologi ini, yang muncul dari terjemahan bahasa Inggris, karena hal ini mengharuskan kita untuk mengakui bahwa Habermas, dalam tulisan aslinya dalam bahasa Jerman, tampaknya menekankan baik konstitusi publik yang struktural (Struktur) maupun yang lentur (Wandel). Sebagai ranah kolektif yang dicirikan oleh proses reproduksi sosial dan transformasi sosial, “ranah publik borjuis berkembang dalam medan yang sarat ketegangan antara negara dan masyarakat” (Habermas 1962, 1989: 141), yaitu, dalam ranah tersier yang terletak di antara negara “dari atas” dan masyarakat “dari bawah”. Tugas bagian berikut adalah untuk mengeksplorasi kekhususan normatif dari ranah “bersarat ketegangan” ini, yang, menurut Habermas, terletak dengan kokoh di antara negara dan masyarakat.

2. Kekhususan Normatif Ruang Publik Borjuis

Kekhususan normatif ruang publik borjuis berasal dari fakta bahwa ruang publik tersebut memiliki potensi emansipatoris. Tentu saja, ini bukan berarti bahwa ruang publik borjuis harus diidealkan sebagai ranah murni kerja sama sosial dan pembebasan manusia. Melainkan, ini berarti mengakui bahwa keberadaannya bergantung pada kapasitasnya untuk mendorong keterlibatan warga dalam proses komunikatif pembentukan opini dan kemauan. Pentingnya desakan Habermas pada potensi emansipatoris ruang publik borjuis hampir tidak dapat dilebih-lebihkan, karena hal ini menggambarkan pentingnya sosiologis dari sifat pemberdayaan praktik komunikatif yang dilakukan oleh aktor rasional.

Dari perspektif Habermas, subjek yang mampu berbicara dan bertindak juga mampu berefleksi dan berwacana, karena klaim validitas yang diajukan oleh para pelaku linguistik dalam komunikasi sehari-hari, setidaknya pada prinsipnya, selalu dapat dikritik. Di ruang publik, kritik terhadap validitas, yang melekat dalam proses komunikasi yang berorientasi pada saling pengertian, dapat diangkat ke status kekuatan pendorong koordinatif dari sosiabilitas rasional. Menurut Habermas, sifat diskursif dari

ruang publik borjuis memmanifestasikan dirinya dalam tiga bentuk kritik: (a) kritik terhadap negara absolutis, (b) kritik terhadap negara demokratis, dan (c) kritik terhadap ruang publik sebagai kekuatan mediasi antara negara dan masyarakat.

Wacana demokrasi yang dihasilkan oleh ruang publik borjuis selalu kritis terhadap otoritas sewenang-wenang yang dijalankan oleh negara absolutis. Mengingat sikap anti-absolutisme ini, kebangkitan ruang publik borjuis merupakan gejala transisi ideologis dan material dari masyarakat pra-modern ke masyarakat modern.

Meskipun secara umum sejalan dengan liberalisme politik, wacana yang lazim dibentuk oleh ruang publik borjuis bersifat kritis terhadap kewenangan sah yang dijalankan oleh negara demokrasi modern. Ruang publik borjuis memang membentuk ranah diskursif yang memungkinkan individu yang terorganisasi secara kolektif untuk bertindak sebagai pengendali kritis negara demokrasi dalam masyarakat modern.

Paradoksnya, wacana-wacana utama yang diajukan oleh ruang publik borjuis tidak hanya kritis terhadap kontrol yang dilakukan oleh negara tetapi juga terhadap diri mereka sendiri, yaitu, terhadap peran wacana-wacana demokratis dalam proses pembentukan negara modern. Ruang publik merupakan ranah individu-individu yang saling bersosialisasi yang mampu menciptakan ruang-ruang solidaritas integratif dan ranah individu-individu yang saling mengkritik yang mampu membangun ruang-ruang refleksivitas diskursif.

Jika kita tinjau makna sosiologis dari semangat kritis yang menjadi ciri khas ruang publik borjuis, maka ada baiknya kita renungkan implikasi normatif dari ketiga ciri tersebut secara lebih rinci:

- Ruang publik borjuis secara tegas menentang bentuk-bentuk dominasi pramodern yang dipaksakan oleh negara-negara absolutis. “Prinsip kontrol yang ditentang publik borjuis terhadap yang terakhir—yaitu publisitas—dimaksudkan untuk mengubah dominasi itu sendiri. Klaim kekuasaan yang disajikan dalam debat publik rasional-kritis (*öffentliches Raisonement*), yang dengan sendirinya menolak bentuk klaim untuk memerintah, akan memerlukan, jika ingin menang, lebih dari sekadar pertukaran dasar legitimasi sementara dominasi dipertahankan pada

prinsipnya” (Habermas 1962, 1989: 28). Publik rasional-kritis dilengkapi dengan kapasitas diskursif untuk mempertanyakan legitimasi bentuk-bentuk kekuasaan yang sewenang-wenang.

- Ruang publik borjuis memperluas kritik khusus terhadap pemerintahan absolutis ke kritik umum terhadap pemerintahan negara, termasuk pemerintahan politik negara-negara demokratis. Akibatnya, pemerintahan yang dijalankan oleh negara modern hanya dapat mengklaim legitimasi sejauh keberadaannya dijadikan objek pengawasan berdasarkan kekuatan diskursif rasionalitas publik. Menurut pandangan ini, bukan hanya bentuk legitimasi politik yang sewenang-wenang tetapi juga demokratis yang dipertaruhkan, karena hakikat legitimasi politik adalah isu normatif yang dibahas dalam ruang publik modern. Jika ada satu hal yang dapat kita anggap remeh di dunia modern, itu adalah fakta bahwa tidak ada yang dapat dianggap remeh. Yang membuat kekuatan ideologis legitimasi politik begitu kuat adalah bahwa, sejauh hal itu tidak dipertanyakan, ia beroperasi di belakang kita; yang membuat kekuatan kritis rasionalitas publik begitu kuat adalah bahwa ia memungkinkan kita untuk mengubah legitimasi politik menjadi objek pengawasan. Warga negara modern dapat mengklaim "ruang publik yang diatur dari atas terhadap otoritas publik itu sendiri, untuk melibatkan mereka dalam perdebatan mengenai aturan umum yang mengatur hubungan dalam ruang pertukaran komoditas dan kerja sosial yang pada dasarnya diprivatisasi tetapi relevan bagi publik." Perdebatan publik yang rasional-kritis membentuk kontrol yang berlawanan terhadap otoritas yang dijalankan oleh negara modern.
- Ruang publik borjuis tidak hanya kritis terhadap negara pramodern dan modern, tetapi juga terhadap dirinya sendiri, karena ia merupakan ranah yang dibangun secara intersubjektif berdasarkan wacana terbuka dan refleksif. “Ia menyediakan tempat pelatihan bagi refleksi publik kritis yang masih disibukkan dengan dirinya sendiri.” Refleksivitas kritis-diri dari entitas yang diperlengkapi secara linguistik—yang, sebagai subjek yang saling berhubungan secara komunikatif, membentuk ruang publik—merupakan sumber daya yang tak ternilai bagi bentuk-bentuk koordinasi tindakan yang dimediasi secara diskursif di era modern. Ruang publik yang diciptakan secara dialogis tidak dapat eksis tanpa refleksi kritis atas konstitusi sosio-historis subjek yang berpotensi tidak kritis. Karakter rasional-kritis

dari ruang publik modern berakar pada kapasitas aktor sosial untuk terlibat dalam wacana intersubjektif yang berorientasi pada koordinasi komunikatif dan regulasi normatif kehidupan sosial.

Tidaklah penting untuk dicatat bahwa analisis rasional-kritis terhadap ruang publik merupakan bagian dari konstitusi rasional-kritis ruang publik. Oleh karena itu, teori Habermas tentang ruang publik terletak di dalam, dan dapat dikritik oleh, ruang publik itu sendiri. “Teori dan praktiknya mengasumsikan bahwa perdebatan kritis merupakan inti dari semua aktivitas intelektual dan setiap ruang publik yang sehat, dan jelas bahwa ia mengharapkan tulisannya sendiri untuk menghadapi kritik dan pertentangan yang secara teratur ia hadapi terhadap para penentangannya” (Kramer 1992: 256). Keterlibatan dalam wacana kritis, yang dihasilkan oleh ruang publik yang produktif, merupakan elemen konstitutif dari kehidupan sosial modern. Potensi normatif ruang publik borjuis berasal dari wacana kritis yang mampu mempertanyakan penerimaan bentuk-bentuk pengalaman sehari-hari yang sudah diterima begitu saja. Dalam pengertian ini, perjuangan atas terciptanya masyarakat emansipatoris “adalah perjuangan untuk menjadikan publisitas sebagai sumber pembentukan konsensus yang beralasan dan progresif” (Calhoun 1992a: 28). Ruang publik adalah ranah kolektif di mana kemampuan kognitif individu untuk mengambil peran sebagai aktor yang kritis dan bertanggung jawab merupakan indikasi kapasitas koordinatif masyarakat untuk mengubah dirinya menjadi proyek emansipatoris yang dibentuk oleh kekuatan normatif rasionalitas komunikatif.

3. Transformasi Struktural Ruang Publik

Transformasi struktural ruang publik dapat dianggap sebagai manifestasi dari sifat tatanan sosial yang bergantung pada sejarah. Baik kebangkitan maupun potensi kehancuran ruang publik menunjukkan bahwa potensi transformatif ruang publik intersubjektivitas tidak dapat dipisahkan dari sifat perkembangan masyarakat. Dengan kata lain, transformasi ruang publik harus diperiksa dalam konteks yang lebih luas dari proses transisi makrostruktural. Dengan demikian, sejarah ruang publik tidak boleh diperlakukan sebagai perkembangan yang mengambang bebas yang terpisah dari proses sosial yang lebih luas; sebaliknya, ia harus dipahami sebagai bagian integral dari proses-proses ini (Thompson 1995: 71). Namun, masih ada pertanyaan tentang apa saja

ciri utama transformasi struktural ruang publik dan mengapa ciri-ciri tersebut signifikan secara sosiologis.

Menurut Habermas, transformasi struktural ruang publik pada akhir abad kedua puluh merupakan proses disintegrasi sosial: “selama sekitar satu abad fondasi sosial ruang ini telah terperangkap dalam proses dekomposisi. Kecenderungan yang mengarah pada keruntuhan ruang publik tidak dapat disangkal, karena meskipun cakupannya meluas secara mengesankan, fungsinya telah menjadi semakin tidak signifikan” (Habermas 1962, 1989: 4). Di sini perlu dikemukakan bahwa, mengikuti analisis Habermasian, ada tiga ketegangan utama yang saling terkait yang merupakan inti dari proses dekomposisi ruang publik: (a) ketegangan antara kepentingan universal dan khusus, (b) ketegangan antara alasan komunikatif dan instrumental, dan (c) ketegangan antara potensi yang memberdayakan dan yang melemahkan.

- Ketegangan antara kepentingan universal dan kepentingan khusus merupakan gejala dari karakter ideologis yang kontradiktif dari ruang publik borjuis. Intinya, perbedaan normatif antara elemen universalistik dan partikularistik dari ruang publik disebabkan oleh kebingungan antara emansipasi kaum pria dengan emansipasi kaum borjuis: “sangat mudah pada saat itu untuk mengidentifikasi emansipasi politik dengan emansipasi ‘manusia.’” Jika emansipasi sosial diupayakan dalam istilah-istilah khusus kelas, bukan dalam istilah-istilah yang melampaui kelas, maka cita-cita emansipasi manusia secara efektif direduksi menjadi cita-cita emansipasi politik. Yang pasti, kesadaran Habermas tentang perbedaan antara emansipasi kelas yang melampaui kaum pria dan emansipasi kelas-spesifik kaum borjuis tertanam dalam pandangan Marxis dan pasca-Marxis tentang masyarakat modern. Konsepsi Habermas tentang masyarakat secara tegas berada dalam tradisi pemikiran Marxis karena ia mengakui bahwa emansipasi politik tidak sama dengan emansipasi manusia jika didefinisikan dalam istilah kelas-spesifik, bukan dalam istilah spesies-konstitutif. Pada saat yang sama, konsepsi Habermas tentang masyarakat melampaui tradisi pemikiran Marxis karena ia menyatakan bahwa potensi emansipatoris dari ruang publik borjuis, yang berasal dari sifat rasional-kritisnya, tidak dapat begitu saja disangkal dengan mengasumsikan, dalam gaya Marxis ortodoks, bahwa produksi pengetahuan di ruang publik borjuis dapat

- direduksi menjadi konstruksi ideologi belaka dan, oleh karena itu, menjadi penyebaran "kesadaran yang salah" : “Tetap saja, publisitas...tampaknya lebih dan lebih dari sekadar secarik ideologi liberal” (Habermas 1962, 1989: 4). Konstitusi ruang publik modern dalam masyarakat kapitalis bersifat paradoks karena keterbukaannya secara apriori sebagai ranah “sipil” yang berorientasi pada inklusi politik dan penutupannya secara de facto sebagai ranah “borjuis” yang didasarkan pada pengucilan sosial. Sejauh wacana yang dihasilkan dalam ruang publik borjuis dimotivasi oleh latihan dialogis pengambilan perspektif kritis, mereka dapat mengklaim untuk mewakili, atau setidaknya berusaha untuk mewakili, kepentingan masyarakat. Sejauh wacana yang dihasilkan dalam ruang publik borjuis didasarkan pada perspektif kelas dominan, mereka melayani, pertama dan terutama, kepentingan kelompok sosial tertentu. Singkatnya, ketegangan antara kepentingan universal dan khusus dapat dianggap sebagai elemen pertama yang, karena sifatnya yang kontradiktif, telah berkontribusi pada degenerasi ruang publik borjuis yang mantap.
- Ketegangan antara nalar komunikatif dan instrumental merupakan sumber gesekan lain yang secara substansial telah berkontribusi pada dekomposisi bertahap ruang publik borjuis. Sebagaimana diingatkan Habermas, “ruang publik borjuis yang berkembang sepenuhnya didasarkan pada identitas fiktif dari dua peran yang diasumsikan oleh individu-individu yang diprivatisasi yang berkumpul untuk membentuk publik: peran pemilik properti dan peran manusia yang murni dan sederhana.” Dalam masyarakat kapitalis, individu-individu yang diprivatisasi menemukan diri mereka dalam posisi ambivalen dalam mengambil peran sebagai *homme*, yang mampu melakukan penalaran komunikatif, sementara bercita-cita untuk peran sebagai borjuis, yang cenderung melakukan penalaran instrumental, “Ambivalensi ruang privat ini juga merupakan ciri ruang publik,” karena individu-individu yang bersama-sama membentuk ruang publik juga merupakan bagian dari ruang privat. Dengan demikian, kita perlu mengenali jalinan nalar komunikatif dan instrumental baik dalam ruang privat maupun publik. Individu-individu privat tidak dapat melepaskan diri dari keterlibatan mereka dalam ruang publik, sebagaimana individu-individu publik tidak dapat melampaui keterlibatan mereka dalam ruang privat. Jika ruang privat diidentifikasi dengan ruang intim keluarga suami istri,

- di satu pihak, dan ranah pertukaran komoditas dan kerja sosial, di pihak lain, maka hal itu didasarkan pada sebuah kontradiksi: keistimewaan “privat”-nya tidak hanya bergantung pada “publik”, tetapi juga “publik”. Karakter publik dari ranah privat terwujud dalam komposisi sosial pasar. Meskipun pertukaran komoditas pasar didasarkan pada kepemilikan pribadi oleh warga negara yang bebas, prasyarat bagi keberadaannya adalah pembangunan ranah publik melalui kekuatan kerja sosial. Dalam masyarakat kapitalis-liberal, ranah publik tidak hanya merupakan ranah diskursif dari intersubjektivitas kritis, tetapi juga ranah instrumentalitas yang bertujuan dan dikomoditiasi. Signifikansi sosiologis dari kedua dimensi tersebut menggambarkan bahwa yang menjadi inti dari ranah publik adalah ketegangan mendalam antara nalar komunikatif dan instrumental: publik tidak hanya diciptakan oleh subjek-subjek sosial yang berhubungan satu sama lain dalam forum yang ditopang oleh proses komunikasi diskursif dan dibentuk oleh pertemuan-pertemuan intersubjektivitas kritis, tetapi juga dijajah oleh objek-objek privat yang bersaing satu sama lain dalam pasar yang didirikan atas mekanisme-mekanisme regulasi sistemik dan berorientasi pada utilitas yang menguntungkan.¹⁰ Sementara forum mengartikulasikan kepentingan publik dari subjek-subjek berorientasi konsensus yang mampu berkomunikasi, pasar mewujudkan kepentingan pribadi dari subjek-subjek yang digerakkan oleh utilitas yang terbenam dalam persaingan. Dari perspektif Habermasian, ketegangan antara kekuatan kritis nalar komunikatif dan logika fungsional nalar instrumental dapat dianggap sebagai faktor penentu lain dalam proses dekomposisi ruang publik modern.
- Ketegangan antara potensi pemberdayaan dan pelemahan era modern merupakan hal mendasar bagi penjelasan Habermas tentang transformasi ruang publik. Signifikansi sosiologis dari ketegangan ini sulit diremehkan, karena hal ini menunjukkan ambivalensi mendalam dari potensi normatif yang melekat dalam masyarakat modern. Salah satu paradoks penting dari ruang publik modern adalah bahwa perluasannya yang berkelanjutan terkait erat dengan dekomposisi bertahapnya. Proses pembentukan sosial dapat mengantisipasi proses deformasi sosial; demokratisasi massa dapat menyebabkan proses inflasi partisipasi politik; keterbukaan sosial dapat mengakibatkan kontraksi ideologis. “Pelemahan fondasi ruang publik terjadi...melalui “refeudalisasi” masyarakat....Negara dan masyarakat,

yang dulunya berbeda, kini saling terkait. Ruang publik perlu diubah karena perbedaan antara ranah publik dan ranah privat menjadi kabur, persamaan antara ranah intim dan kehidupan privat runtuh dengan polarisasi keluarga dan masyarakat ekonomi, perdebatan rasional-kritis memberi jalan bagi konsumsi budaya.” (Calhoun 1992a: 21) Dengan kata lain, ada dua ranah sistemik yang telah secara tegas membentuk transformasi ranah publik: negara dan pasar. Yang pertama mengubah ranah publik menjadi ranah sosial yang sebagian diatur oleh logika fungsionalis administrasi birokrasi. Yang kedua mengubah ranah publik menjadi ranah sosial yang sebagian digerakkan oleh logika fungsionalis komodifikasi kapitalis. Keberadaan rasionalitas fungsionalis di mana-mana menimbulkan tantangan bagi kemungkinan otonomi manusia. Dalam dunia yang sebagian besar diatur oleh kekuatan rasionalitas fungsionalis yang digerakkan oleh utilitas, potensi kritis ranah publik yang diciptakan secara komunikatif dirusak oleh kapasitas kendali negara yang mengatur dan pasar yang mengkomodifikasi. Rasionalitas sistemik yang disebarkan oleh negara yang mengatur dan pasar yang mengkomodifikasi dapat menurunkan potensi kritis ranah publik menjadi pelengkap dekoratif dari dunia yang kecewa. Jika direduksi menjadi elemen perifer dari proses kendali sistemik, ranah publik merosot menjadi ranah pasar yang diatur oleh negara. Fungsi sistemik masyarakat modern akhir tidak dapat dibayangkan tanpa standarisasi media massa. Didorong oleh keharusan instrumental industri budaya, media massa memainkan peran penting dalam regulasi sistemik ruang publik. Pada prinsipnya, potensi rasional-kritis ruang publik dapat ditelan oleh potensi integrasionis media massa: “Karena “budaya” yang disebarkan oleh media massa adalah budaya integrasi....Ruang publik mengasumsikan fungsi periklanan. Semakin dapat digunakan sebagai wahana propaganda politik dan ekonomi, semakin tidak politis secara keseluruhan dan menjadi pseudo-privatisasi....Sejauh publik dan privat menjadi ranah yang saling terkait, model ini menjadi tidak berlaku (Habermas, 1962)” Sifat integrasionis media massa mengubah ruang publik menjadi pelengkap fungsionalis reformisme politik. Antagonisme kelas diabadikan oleh integrasionisme sistemik media massa. Oleh karena itu, elemen konstitutif dari ruang publik borjuis, yaitu potensi kritisnya yang berasal dari refleksi, tampaknya memberi jalan kepada komponen inti industri budaya, yaitu, kecenderungannya

terhadap komodifikasi konstan: " Media massa...sendiri telah menjadi otonom, untuk mendapatkan persetujuan atau setidaknya kepatuhan dari publik yang dimediasi. Publisitas dihasilkan dari atas, sehingga dapat dikatakan, untuk menciptakan aura niat baik untuk posisi tertentu. Awalnya publisitas menjamin hubungan antara debat publik yang rasional-kritis dan landasan legislatif dominasi, termasuk pengawasan kritis terhadap pelaksanaannya. Sekarang hal itu memungkinkan ambivalensi khusus dari dominasi yang dilakukan melalui dominasi opini nonpublik: hal itu melayani manipulasi publik sebanyak legitimasi di hadapannya. *Publisitas kritis digantikan oleh publisitas manipulatif.*" Rasionalitas komunikatif yang melekat dalam ruang publik dapat dijajah oleh rasionalitas fungsionalis yang melekat dalam negara dan ekonomi. Umumnya, proses penjajahan ini tidak ditentang secara terbuka tetapi secara diam-diam dilegitimasi oleh media massa "borjuis". Penjajahan dunia kehidupan oleh sistem diperkuat, bukannya dirusak, oleh media massa. Dalam kondisi modernitas akhir, maka, bukan sistem yang dibentuk oleh dunia kehidupan, tetapi, sebaliknya, dunia kehidupan yang dijajah oleh sistem. Singkatnya, ketegangan antara sifat emansipatoris dari rasionalitas komunikatif dan sifat instrumental dari rasionalitas bertujuan menimbulkan tantangan yang signifikan terhadap organisasi ruang publik modern.

C. REFLEKSI KRITIS TERHADAP TEORI HABERMAS TENTANG RUANG PUBLIK

Teori Habermas tentang ruang publik telah dibahas secara luas dalam literatur. Teori ini dikritik dengan berbagai cara karena, alih-alih karena, penjelasan Habermas tentang ruang publik sangat berpengaruh. Oleh karena itu, kritik yang beraneka ragam yang ditujukan terhadap teori Habermas tentang ruang publik tidak boleh ditafsirkan secara sepihak sebagai bukti kelemahan analisis dan ketidakcukupan penjelasannya; sebaliknya, kritik tersebut harus dianggap sebagai indikasi fakta bahwa Habermas menyediakan kerangka teori yang berguna dan berwawasan untuk memahami transformasi struktural ruang publik pada periode modern. Meskipun memiliki banyak kelebihan, penting untuk menyadari keterbatasan analisis teori Habermas tentang ruang publik. Tujuan dari bagian ini adalah untuk menjelaskan kekurangan utama pendekatan Habermas terhadap

transformasi struktural ruang publik dan dengan demikian menggambarkan bahwa penjelasannya perlu direvisi secara substansial jika ingin berfungsi sebagai kerangka teori untuk memahami meningkatnya kompleksitas ruang publik di masyarakat maju.

Analisis Habermas tentang ruang publik dapat dikritik karena berpusat hampir secara eksklusif pada hakikat kehidupan publik borjuis (*bürgerliche Öffentlichkeit*). Mereduksi kompleksitas ruang publik modern menjadi singularitas ruang publik borjuis berarti meremehkan signifikansi sosiologis dari ranah kolektif alternatif—yaitu non-borjuis—yang berkontribusi pada keterlibatan rasional-kritis dengan dunia. Meskipun Habermas menyadari hakikat khusus kelas dari ruang publik borjuis, “ia mengabaikan pentingnya perkembangan ruang publik plebeian yang sezaman di samping dan sebagai lawan dari ruang publik borjuis, *sebuah ruang yang dibangun di atas bentuk-bentuk kelembagaan yang berbeda*” (Garnham 1992: 359; cetak miring ditambahkan) Analisis yang dibatasi pada kajian ruang publik borjuis berisiko mengecualikan ruang publik lain yang sama pentingnya dari gambaran tersebut. Konsolidasi ruang publik borjuis bersifat paradoks karena ia mempromosikan wacana kepentingan universal manusia, sementara dalam praktiknya melayani kepentingan khusus kelompok dominan dalam masyarakat: “Wacana publisitas yang menggembar-gemborkan aksesibilitas, rasionalitas, dan penanguhan hierarki status itu sendiri digunakan sebagai *strategi pembedaan* (Fraser 1992: 115; cetak miring ditambahkan).” Dengan kata lain, klaim universalitas wacana publik borjuis— yang diungkapkan dalam slogan Revolusi Prancis: “*liberté, égalité, fraternité*” tetap terjebak dalam pengejaran kepentingan khusus kelas. Karena politik universalitas yang dianjurkan oleh ruang publik borjuis mewakili, di atas segalanya, kepentingan khusus kelas dominan, bahkan jika ia mengklaim untuk mewujudkan kepentingan umum kemanusiaan. *Liberté bourgeois* didefinisikan terutama dalam konteks kebebasan negatif seperti “kebebasan dari”, dan bukan dalam konteks kebebasan positif seperti “kebebasan untuk” *Borjuis égalité*, pertama dan terutama, adalah kesetaraan kesempatan sebagai hak formal, bukan kesetaraan hasil sebagai hak substantif. *Borjuis fraternité*, dalam praktiknya, adalah jenis solidaritas kompetitif eksklusif antara kelompok sosial istimewa, bukan bentuk inklusif solidaritas tanpa syarat antara semua manusia. Untuk mereduksi analisis ruang publik modern menjadi pemeriksaan ranah sosial yang dihasilkan dan dikendalikan oleh kelas dominan berarti mengesampingkan ruang kolektif

yang diciptakan dan dibentuk oleh kelompok sosial lain, yang keberadaan dan pengaruhnya memainkan peran penting dalam konstruksi kehidupan publik modern.

Habermas menyajikan gambaran yang agak idealis tentang ruang publik. Mengingat penekanannya yang sepihak pada fakta bahwa ruang publik borjuis memiliki karakter "rasional-kritis"¹⁵, ia cenderung melebih-lebihkan signifikansi fitur emansipatoris kehidupan publik modern dan karena itu meremehkan pengaruh elemen-elemen represifnya. Seperti yang diakui Habermas secara kritis, "...sangat menggoda untuk mengidealkan ruang publik borjuis dengan cara yang jauh melampaui idealisasi yang sah secara metodologis seperti yang terlibat dalam konseptualisasi ideal-tipikal (Habermas 1992: 442; cetak miring ditambahkan)." Ruang publik tidak kurang diresapi oleh hubungan kekuasaan daripada masyarakat secara keseluruhan. Sifat publisitas yang sarat kekuasaan diresapi dengan konstitusi masyarakat yang bertingkat. Sifat ideologis wacana publik tertanam dalam organisasi material sumber daya sosial. Sumber daya simbolik kritik selalu bergantung pada sumber daya sosial kekuasaan. Struktur vertikal masyarakat memanifestasikan dirinya dalam struktur ideologi yang sarat kepentingan: subjek yang diposisikan secara sosial menghasilkan wacana yang bergantung pada hubungan. Wacana hegemonik yang dihasilkan dalam ruang publik borjuis mengekspresikan kepentingan khusus kelompok sosial yang paling berkuasa. Wacana elit yang terdidik, kaya, sebagian besar berkulit putih, dan didominasi laki-laki mencerminkan kepentingan khusus sektor-sektor istimewa masyarakat (Thompson 1995: 72). Mengidealkan ruang publik sebagai ranah komunikatif intersubjektivitas rasional-kritis berarti meremehkan dampak substantif hierarki yang sarat kepentingan pada pembentukan interaksi komunikatif dalam masyarakat yang terstratifikasi.

Pandangan Habermas tentang ruang publik sebagian besar tidak memandang gender. Meskipun demikian, dalam tanggapannya terhadap keberatan yang diajukan oleh para kritikus feminis, Habermas mengakui bahwa sifat patriarki ruang publik Eropa modern hampir tidak dapat diabaikan: "...berkembangnya literatur feminis telah meningkatkan kesadaran kita terhadap karakter patriarki ruang publik itu sendiri (Habermas 1992: 427; cetak miring ditambahkan)." Ketidakesetaraan gender, yang di sebagian besar masyarakat Barat terwujud dalam bentuk norma heteroseksis dan maskulin, bukanlah fenomena sampingan, melainkan elemen utama dari ruang publik modern. Marginalisasi perempuan

dalam ruang publik modern serta pengucilan de facto mereka dari posisi kekuasaan tertentu—misalnya, yang ditetapkan secara agama—dapat dilihat sebagai ekspresi karakter patriarki masyarakat secara umum dan sebagai perluasan karakter patriarki keluarga borjuis secara khusus. Untuk menjelaskan signifikansi normatif dari pembagian kekuasaan berdasarkan gender dalam masyarakat modern, kita harus mengakui bahwa ruang publik modern tidak dapat lepas dari keberadaan bentuk patriarki yang dibangun secara material dan diskursif.

Dalam konteks yang sama, analisis Habermas tentang ruang publik didasarkan pada asumsi yang terlalu rasionalistik. Dengan demikian, analisis ini berada dalam tradisi teori sosial yang didominasi laki-laki, yang mengemukakan apa yang digambarkan oleh para feminis sebagai konsepsi "aliran laki-laki" tentang dunia sosial dan perkembangan sosial: "Interpretasi [*Habermas*] mendasari konsepsi budaya publik yang terlalu rasionalistik dalam model republik yang dibangun di atas cita-cita Pencerahan tentang rasionalisme (Kuyper 2000: 221; cetak miring ditambahkan)." Gagasan bahwa ruang publik borjuis didominasi oleh produksi wacana rasional-kritis yang berkelanjutan yang memberi masyarakat potensi emansipatoris didasarkan pada pandangan picik bahwa kita dapat, dan harus, mengutamakan bentuk-bentuk keterlibatan rasional daripada bentuk-bentuk non-rasional dengan dunia. Yang pasti, adalah mungkin untuk mempertanyakan konsepsi rasionalistik tentang aktor manusia tersebut tanpa menyangkal bahwa rasionalitas dapat, dan sering kali memang, merupakan sumber penting emansipasi sosial. Akan tetapi, kita perlu menyadari bahwa pendekatan neo-Kantian, yang secara tepat menekankan sumber daya rasionalitas yang memberdayakan, cenderung meremehkan kompleksitas sosial yang muncul dari bentuk-bentuk publik intersubjektivitas, yang sifatnya yang beraneka ragam melampaui ranah bentuk-bentuk normativitas yang dipandu oleh akal budi. Berbagai bentuk budaya—seperti seni, musik, tari, dan lukisan—memperoleh potensi emansipatorisnya dari kemampuannya untuk bangkit di atas ranah akal budi yang tampaknya tidak berwujud.

Teori Habermas tentang ruang publik bermasalah karena teori ini mempromosikan konsepsi universal tentang kepentingan publik yang didasarkan pada penjelasan monolitik tentang kehidupan publik. Asumsi bahwa ruang publik borjuis mewakili ruang publik dunia kontemporer secara par excellence bersifat reduktif secara

konseptual dan empiris. Karena pandangan seperti itu gagal memperhitungkan fakta bahwa masyarakat modern mengandung banyak ruang publik yang ada secara bersamaan, dan sering kali saling bersaing. Meningkatnya pluralisasi ruang publik modern mencerminkan meningkatnya diferensiasi masyarakat yang kompleks. Ruang publik modern adalah ranah interaksi yang dibedakan dan bertingkat dan, dengan demikian, dihuni oleh berbagai kelompok sosial, beberapa di antaranya menempati posisi subordinat dalam masyarakat: anggota kelas pekerja, minoritas politik, minoritas etnis, minoritas agama, dan minoritas seksual—hanya untuk menyebutkan beberapa dari kelompok ini. Kelompok sosial yang dikecualikan dari berbagi monopoli kekerasan simbolik dalam masyarakat tertentu memiliki kepentingan dalam menciptakan ruang publik alternatif yang secara material didukung oleh praktik kontra-hegemonik dan secara ideologis dilegitimasi oleh wacana kontra-hegemonik. Potensi pemberdayaan yang dimiliki oleh ruang publik alternatif berasal dari kapasitasnya untuk menantang legitimasi praktik dan wacana dominan dengan menciptakan kontra-hegemoni. Ranah yang didasarkan pada praktik-praktik alternatif dan wacana-wacana alternatif. Hegemoni perlu terus-menerus dihegemoni ulang untuk memastikan bahwa hegemoni tersebut tidak didehegemoni. Kontra-hegemoni perlu terus-menerus didehegemoni untuk menghindari hegemoni. Ruang publik alternatif, dengan demikian, dapat dicirikan sebagai “kontra publik subaltern untuk memberi sinyal bahwa mereka adalah arena-arena diskursif paralel tempat para anggota kelompok sosial yang tersubordinasi menciptakan dan mengedarkan kontra-wacana untuk merumuskan interpretasi-interpretasi oposisional atas identitas, kepentingan, dan kebutuhan mereka (Fraser 1992: 123; cetak miring pada aslinya).” Mengabaikan kemungkinan membangun ruang publik polisentris berarti mengabaikan potensi-potensi normatif pluralisme radikal yang berasal dari persaingan antara praktik-praktik dan wacana-wacana hegemonik dan kontra-hegemonik di ranah publik yang berbeda.

Analisis sosio-historis Habermas tentang dunia modern didasarkan pada perbedaan dikotomis antara publik dan privat. Namun, seperti dijelaskan di atas, perbedaan antara publik dan privat harus dianggap sebagai pemisahan analitis, bukan empiris, karena masyarakat adalah gabungan ranah yang dibangun secara relasional yang batas-batasnya jauh dari jelas: "Secara umum, teori kritis perlu melihat lebih dalam dan lebih kritis pada istilah "privat" dan "publik". Bagaimanapun, istilah-istilah ini bukan sekadar sebutan

langsung untuk ranah masyarakat (Fraser 1992: 131)." Perbedaan konseptual antara publik dan privat relatif sewenang-wenang karena ranah publik dihasilkan oleh subjek privat, sebagaimana ranah privat terdiri dari subjek publik. Memang, konstruksi semua ranah sosial bergantung pada interaksi subjek privat dan publik. Apa pun tingkat diferensiasi struktural dari formasi sosial tertentu, keterkaitan ranah sosial berasal dari keterhubungan tindakan sosial. Sejauh konstruksi ranah sosial berasal dari realisasi tindakan sosial, kemungkinan koeksistensi manusia bergantung pada konsolidasi struktur sosial. Struktur sosial tanpa tindakan manusia sama saja dengan masyarakat tanpa subjek. Sejauh aktor manusia merupakan subjek privat dan publik, tindakan multikontekstual mereka melampaui antinomi publik/privat dan dengan demikian berkontribusi pada konstruksi realitas sosial yang plural.

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Studi kritis tentang ruang publik merupakan inti dari pemahaman sosiologis tentang potensi emansipatoris yang melekat dalam proses komunikasi masyarakat modern. Teori sosial Habermas memberikan wawasan yang tajam tentang konstitusi normatif dan transformasi struktural ruang publik di era modern. Jauh dari sekadar ranah autopoietik perdebatan yang merujuk pada diri sendiri, ruang publik memainkan peran penting dalam menyediakan forum bagi proses deliberatif yang ditujukan pada pembangunan masyarakat yang demokratis. Memang, perkembangan kehidupan sosial di era modern dibentuk oleh peluang normatif dan keterbatasan normatif wacana publik. Pentingnya sosiologis dikotomi publik/swasta tercermin tidak hanya dalam fakta bahwa hal itu telah banyak dibahas dalam literatur tetapi juga, yang lebih penting, dalam fakta bahwa pemisahan antara ranah publik dan privat merupakan hal mendasar bagi pembangunan masyarakat liberal modern. Bagian pertama dari makalah ini telah mengkaji secara kritis dikotomi publik/swasta dalam hal signifikansi historis dan sosiologisnya. Variabilitas historis dikotomi publik/swasta terwujud dalam kontingensi material dan ideologisnya: kontingensi materialnya disebabkan oleh kenyataan bahwa masyarakat yang berbeda menghasilkan bentuk kehidupan publik dan privat yang berbeda; kontingensi ideologisnya disebabkan oleh fakta bahwa masyarakat yang berbeda menghasilkan wacana yang berbeda tentang hakikat kehidupan publik dan privat. Singkatnya, realitas dan gagasan tentang hubungan antara publik dan privat bervariasi dari waktu ke waktu dan antara masyarakat yang berbeda. Analisis ontologi dikotomi publik/privat berkaitan dengan pertanyaan tentang apa sebenarnya pemisahan konseptual antara publik dan privat. Seperti dijelaskan di atas, tiga perbedaan sangat penting dalam hal ini. (a) Perbedaan antara masyarakat dan individu mengacu pada perbedaan antara "kolektif" dan "pribadi". Menurut definisi, ilmu sosial cenderung mengutamakan "sosial" daripada "individu" dan, akibatnya, memahami publik dan privat dalam istilah relasional. (b) Perbedaan antara visibilitas dan penyembunyian menunjukkan perbedaan antara "transparan" dan "buram". Misi historis dari ruang publik yang aktif dan demokratis adalah untuk memastikan bahwa pelaksanaan kekuasaan negara dapat mengklaim legitimasi hanya sejauh penerimaan sosialnya tunduk pada transparansi pemerintah dan akuntabilitas publik. (c) Perbedaan antara keterbukaan dan tertutupan berkaitan dengan perbedaan antara

“yang dapat diakses” dan “yang tertutup”. Namun, seperti halnya lembaga publik—seperti negara—jarang sekali terbuka sepenuhnya, lembaga privat—seperti keluarga—tidak terpisah secara struktural tetapi tertanam secara sosial. Dengan demikian, “dikotomi besar” antara publik dan privat bergantung pada perbedaan idealtipikal yang validitas analitisnya perlu diukur dari segi penerapan empirisnya. Bagian kedua dari makalah ini berupaya menjelaskan teori Habermas tentang ruang publik. Seperti yang ditunjukkan di atas, penjelasan Habermas tentang ruang publik sangat kompleks, dan analisis sebelumnya sama sekali tidak bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif tentang elemen dan praanggapan konstitutifnya. Sebaliknya, makalah ini berfokus pada tiga dimensi utama: (i) konsep ruang publik, (ii) kekhususan normatif ruang publik borjuis, dan ruang publik di era modern. (iii) Menurut Habermas, ruang publik merupakan ranah yang dibangun secara intersubjektif oleh individu-individu yang diperlengkapi secara linguistik dan terlibat secara diskursif. Dengan memediasi antara keharusan sistemik yang dipaksakan “dari atas” dan masalah-masalah normatif yang diartikulasikan “dari bawah”, ruang publik modern muncul sebagai ranah yang sarat ketegangan antara negara dan masyarakat. Dengan demikian, secara struktural terbagi antara dua bentuk rasionalitas yang saling bertentangan: rasionalitas fungsionalis, yang mendasari mekanisme pengarahan dan pengaturan sistemik, dan rasionalitas komunikatif, yang dimobilisasi oleh para aktor yang mampu melakukan ujaran intersubjektif, refleksi yang bertujuan, dan tindakan yang disengaja. (ii) Kekhususan normatif ruang publik borjuis berasal dari fakta bahwa, pada prinsipnya, ia merupakan ranah interaksi sosial yang memberdayakan. Seperti yang dikemukakan di atas, potensi emansipatorisnya ada tiga dan memanifestasikan dirinya dalam (a) pertentangan ideologisnya terhadap bentuk-bentuk kekuasaan yang sewenang-wenang, (b) fungsi pengawasannya dalam kaitannya dengan legitimasi politik negara-negara modern, dan (c) keterlibatan reflektifnya dengan bentuk-bentuk penalaran publik. Pada akhirnya, potensi emansipatoris dari ruang publik terletak pada sumber daya rasional-kritis dari subjek yang berinteraksi secara linguistik. Ruang publik tidak dapat dibayangkan tanpa kapasitas orang untuk mengatasi keterbatasan normatif masyarakat individualistis melalui kekuatan koordinatif individu yang disosialisasikan dan disosialisasikan. Ruang publik pada akhir abad kedua puluh merupakan proses disintegrasi sosial. Seperti yang dikemukakan di atas, tiga ketegangan mendasar yang mendasari proses dekomposisi bertahap ini dapat diidentifikasi. (a) Ketegangan antara kepentingan universal dan khusus terletak di jantung

ruang publik modern. Klaim retorik terhadap universalitas tidak selalu dapat menyembunyikan kekhususan yang sarat kepentingan. (b) Dalam nada yang sama, ketegangan antara nalar komunikatif dan instrumental menggambarkan bahwa, dalam masyarakat liberal-kapitalis, ruang publik tidak hanya merupakan ranah diskursif intersubjektivitas kritis, tetapi juga ranah instrumentalitas yang dikomodifikasi secara sengaja. Sejauh forum debat menghasilkan ruang publik yang rasional-kritis, pasar yang digerakkan oleh laba menghasilkan ruang publik yang dikomodifikasi. (c) Ketegangan antara potensi pemberdayaan dan pelemahan sangat penting bagi konsepsi kritis Habermas tentang masyarakat modern. Paradoksnya, perluasan ruang publik yang semakin meningkat telah berkontribusi pada dekomposisinya secara bertahap. Keharusan komodifikasi masyarakat kapitalis tampaknya mengubah ruang publik menjadi ruang pasar. Jika dibiarkan tanpa tantangan, "tangan tak terlihat" pasar dan "tangan terlihat" negara tampaknya cukup kuat untuk menetralkan kekuatan rasional-kritis publik. Bagian ketiga dari makalah ini telah meneliti beberapa kekurangan utama teori Habermas tentang ruang publik. (a) Ini adalah borjuis-sentris dalam hal itu berfokus hampir secara eksklusif pada ruang publik hegemonik dari kelas penguasa, dengan demikian meremehkan signifikansi sosial dan politik dari ruang publik alternatif. (b) Ini idealis dalam hal itu cenderung melebih-lebihkan potensi emansipatoris wacana publik liberal. (c) Ini buta gender dalam hal itu tidak memperhitungkan dampak diskriminasi seksis pada perkembangan kehidupan publik dalam masyarakat modern. (d) Ini terlalu rasionalistis dalam hal itu memahami rasionalitas komunikatif sebagai kekuatan pendorong emansipatoris utama dari interaksi manusia. (e) Ini menganjurkan konsepsi universalistik tentang kepentingan publik, dengan demikian mengabaikan fakta bahwa masyarakat maju terdiri dari banyaknya ruang publik yang bersaing, dan sering kali kontra-hegemonik. (f) Pandangan dikotomisnya tentang sosial gagal mempertanyakan validitas perbedaan biner antara publik dan privat. Sulit untuk mempelajari ruang publik modern tanpa mengacu pada Habermas, tetapi mustahil untuk memahami transformasi ruang publik modern akhir tanpa melampaui kerangka konseptualnya. Jika kekurangan di atas ditangani dengan serius, teori ruang publik Habermas dapat berfungsi sebagai dasar analitis untuk menghadapi tantangan normatif yang timbul dari kompleksitas material dan simbolik masyarakat maju.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas saran kami, untuk membangun sistem pelayanan publik yang baik dan transparan, teori Habermans menjadi salah satu pilihan. Tetapi untuk mencapai hasil yang maksimal dibutuhkan penelitian lebih lanjut agar disesuaikan dengan konteks budaya setempat.

Daftar Pustaka

- Brettschneider, Corey. 2007. "The Politics of the Personal: A Liberal Approach", *American Political Science Review* 101, 1: 19-32.
- Butt, Trevor & Darren Langdrige. 2003. "The Construction of Self: The Public Reach into the Private Sphere", *Sociology* 37, 3: 477-492.
- Calhoun, Craig (ed.), 1992a. *Habermas and the Public Sphere*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Calhoun, Craig. 1992b. "Introduction: Habermas and the Public Sphere". Pp. 1-48 in Craig Calhoun (ed.). *Habermas and the Public Sphere*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Cameron, Jenny. 1998. "The Practice of Politics: Transforming Subjectivities in the Domestic Domain and the Public Sphere", *Australian Geographer* 29 (SPI/1): 293-308.
- Condren, Conal. 2009. "Public, Private and the Idea of the 'Public Sphere' in Early Modern England", *Intellectual History Review* 19, 1: 15-28.
- Crossley, Nick & John Michael Roberts (eds.). 2004. *After Habermas: New Perspectives on the Public Sphere*. Oxford: Blackwell/Sociological Review.
- Cutler, A. Claire. 1997. "Artifice, Ideology and Paradox: The Public/Private Distinction in International Law", *Review of International Political Economy* 4, 2: 261-285.
- Dahlgren, Peter. 1991. "Introduction". Pp. 1-24 in Peter Dahlgren & Colin Sparks (eds.), *Communication and Citizenship: Journalism and the Public Sphere in the Media*. London: Routledge.
- Dahlgren, Peter Dahlgren, Peter. 1995. *Television and the Public Sphere: Citizenship, Democracy and the Media*. London: Sage.

Elster, John. 1986. "The Market and the Forum: Three Varieties of Political Theory". Pp. 103-132 in John Elster and Aanund Hylland (eds.) *Foundations of Social Choice Theory*. Cambridge: Cambridge University Press.

Forester, John (ed.). 1985. *Critical Theory and Public Life*. Cambridge, MA: MIT Press.

Fraser, Nancy. 1992. "Rethinking the Public Sphere: A Contribution to the Critique of Actually Existing Democracy". Pp. 109-142 in Craig Calhoun (ed.) *Habermas and the Public Sphere*. Cambridge, MA: MIT Press.

Gardiner, Michael E. 2004. "Wild Publics and Grotesque Symposiums: Habermas and Bakhtin on Dialogue, Everyday Life and the Public Sphere", *The Sociological Review* 52, 1: 28-48.

Garnham, Nicholas. 1992. "The Media and the Public Sphere". Pp. 359-376 in Craig Calhoun (ed.), *Habermas and the Public Sphere*. Cambridge, MA: MIT Press.